



## Perubahan Sosial Pasca Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Masyarakat Pesisir Samboja Kutai Kartanegara Kalimantan Timur

Doni Darmasetiadi<sup>1\*</sup>, Etik Sulistiowati Ningsih<sup>1</sup>, Nurul Ovia Oktawati<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan, FPIK, Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, Indonesia

\*Corresponding author email: [doni.darmasetiadi@fpik.unmul.ac.id](mailto:doni.darmasetiadi@fpik.unmul.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received April 15, 2025

Approved May 20, 2025

#### Keywords:

*Samboja Coastal Society, Social Change, Structural Functional Theory*

#### ABSTRACT

*The development of the Samboja coastal area is expected to bring about social changes. These changes will not recur in the existing behaviors within the community. This study was conducted to identify the social changes occurring in the Samboja coastal area and to explain the social impacts that have been felt after the establishment of the Capital City of Nusantara (IKN). The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques were conducted through interviews. The results of the study indicate that the social changes that have occurred have not been fully felt in the social structure and culture of the Samboja coastal community. Based on structural functional analysis, it is known that the social changes occurring in the Samboja coastal area manifest as a latent dysfunction condition because many expectations have not been realized as planned. Many parties' involvement is still considered insufficient. Furthermore, the social changes in the Samboja coastal area have led to a non-functional condition in the development of the tourist area through the privatization of the beach, which was previously open access. From a structural functional perspective, the condition of the Samboja coastal community has led to a phenomenon of anomie with a tendency towards ritualistic responses.*

#### ABSTRAK

Pembangunan pesisir Samboja diperkirakan akan memberikan perubahan sosial. Perubahan ini tidak akan berulang dalam perilaku yang ada di masyarakat. Kajian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi di pesisir Samboja dan menjelaskan dampak-dampak sosial yang telah dirasakan pasca kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang terjadi belum sepenuhnya dirasakan pada struktur sosial dan budaya masyarakat pesisir Samboja. Berdasarkan analisis fungsional struktural, diketahui perubahan sosial yang terjadi di pesisir Samboja mewujudkan kondisi disfungsi laten karena banyak harapan yang belum terwujud, seperti yang direncanakan. Banyak pihak yang keterlibatannya dianggap masih kurang. Selain itu, perubahan sosial yang hadir dalam kawasan pesisir Samboja diketahui mewujudkan kondisi non-fungsi atas pembangunan daerah wisata melalui privatisasi pantai yang sebelumnya bersifat *open access*. Secara fungsional struktural, kondisi masyarakat pesisir Samboja melahirkan suatu gejala anomie dengan kecenderungan respon ritualisme.

Copyright © 2024, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



---

*How to cite:* Darmasetiadi, D., Ningsih, E. S., & Oktawati, N. O. (2025). Perubahan Sosial Pasca Penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Masyarakat Pesisir Samboja Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(2), 209–219. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i2.3707>

---

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menetapkan ibukota negara Indonesia yang baru bernama Ibu Kota Nusantara pada 2022 (Praditya, dkk, 2023). Proses pembangunan telah dimulai sejak penetapannya dan diperkirakan akan selesai pada tahun 2045. IKN diharapkan menjadi *smart city*, berkelanjutan dan tangguh. Kota ini dibuat untuk mewujudkan masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik dimana teknologi harus menjadi dasar pembangunan dalam modiel dari pertumbuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan menggunakan delapan indikator yakni: pembangunan yang selaras dengan alam, mudah diakses dan terhubung, melingkar, tangguh, aman, terjangkau, ramah teknologi, dan khususnya memberikan peluang ekonomi bagi semua orang (Berawi, 2022).

Pasca penetapan IKN sebagai ibu kota negara yang baru tentu saja telah dimulai pembangunan yang berjangka panjang. Herdiawanto (2023) menemukan bahwa kebijakan penetapan IKN akan berdampak positif pada masa depan Indonesia yang dapat dilihat sektor ekonomi sampai dengan lingkungan, walaupun dapat menimbulkan timbulnya masalah baru, terutama masalah sosio-kultural.

Kehadiran IKN berpeluang menjadi ancaman bagi kondisi struktur sosial lokal (Hidayat dalam Hanafi dkk). Elshaboury dkk dan Koenane (dalam Hanafi, 2024) menjelaskan bahwa modernisasi sering memberikan efek sosial yang signifikan, seperti migrasi yang masif dan perubahan dalam dinamika sosial ekonomi lokal. Masyarakat Kalimantan timur akan menghadapi perubahan yang besar akibat kehadiran IKN ini. Niko (2024) menjelaskan bahwa kehidupan tradisional Masyarakat asli sekitar IKN akan berubah menjadi berorientasi untung-rugi yang ditandai dengan teknologi sehingga memaksakan mereka untuk beradaptasi agar bisa bertahan.

Penetapan IKN telah melahirkan perubahan sosial di masyarakat sekitarnya. Perubahan tersebut memberikan perubahan signifikan pada aksi struktur sosial atau pada budaya yang merupakan produk dari masyarakat atau kelompok masyarakat. Dimensi dari perubahan itu cukup kompleks, seperti sosial dan ekonomi (Servaes, 2011).

Perubahan sosial dialami wilayah di sekitar Kawasan IKN adalah kawasan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kawasan pesisir yang merupakan berbatasan langsung dengan kawasan pesisir IKN dan menjadi komponen yang terintegasi dalam keberadaan IKN itu sendiri. Para penduduk IKN juga banyak bertempat tinggal di kawasan Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk kawasan pesisirnya. Kabupaten Kutai Kartanegara juga memasuki fase transisi dalam segala aspek, sesuai dengan fase yang dijalani oleh IKN sebagai “hub of requirement” (Ulimaz, 2024). Pada tahapan ini Kabupaten Kutai Kartanegara akan memantaskan diri untuk dapat bermitra dengan IKN.

Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan memiliki potensi keuntungan jangka pendek seperti investasi infrastruktur, perdagangan regional, munculnya pekerjaan-pekerjaan baru. Selain itu, keuntungan lain yang terpenting adalah menekankan pentingnya aspek sosio-kultural dan keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek yang potensial sehingga berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Keterlibatan masyarakat lokal akan berkontribusi pada kekuatan aspek sosio-kultural (Jauchar, dkk, 2022).

Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan langsung dengan IKN adalah Kecamatan Samboja (Simarmata dkk, 2023). Kehadiran IKN akan berdampak pada pembangunan fisik di Kecamatan Samboja, terutama jaringan transportasi yang telah ditetapkan Peraturan pada Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara. Perencanaan yang memasukkan Kecamatan Samboja dalam prioritas pembangunan jaringan transportasi dalam Kawasan Ibu Kota Nusantara (KIKN) terdiri atas dua bagian, yakni Simpang Samboja dan Kuala Samboja. Jaringan transportasi menggunakan varian berbagai transportasi publik sebagai sarana transportasi utama di IKN (Perka Otorita No.1 tahun 2022).

Jaringan transportasi di Kecamatan Samboja terdiri atas jalanan umum, jalanan tol, terminal bus, jembatan, tempat pemberhentian bus dan pembangunan stasiun rel dan pelabuhan penampungan yang terintegrasi dengan tempat pendaratan ikan (Samboja Kuala). Samboja dan Samboja Kuala akan menjadi area yang sangat berpengaruh dalam pengaruh kedaulatan nasional, seperti pertahanan dan keamanan nasional, kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan (Perka Otorita No.1 tahun 2022).

Pembangunan jaringan transportasi yang mencakup Kecamatan Samboja akan transisi mengubah wajah seluruh kawasan menjadi daerah tempat tinggal atau area urban, termasuk kawasan pesisir. Dalam tahapan ini, transisi ini memiliki ciri khas, antara lain: jumlah penduduk yang padat, fasilitas yang beragam, kawasan yang dibangun luas. Transisi ini terjadi karena posisi pesisir yang strategis karena menjadi pintu masuk dari kawasan kabupaten/kota lain (Budiman dkk, 2024). Selain pembangunan fisik, Kecamatan Samboja akan diuntungkan secara ekonomi dalam kenaikan lahan jumlah lahan yang dijual. Para pendatang baru akan menanyakan tanah jika mereka berinteraksi dengan warga sekitar dengan cukup waktu. Jumlah penjualan tanah juga meningkat dalam bentuk kavling dengan ukuran dari 150 sampai dengan 300 meter (Satriani, 2023).

Keberadaan IKN turut serta membawa dampak pembangunan fisik di kawasan pesisir Samboja. Kondisi ini pun dapat mengembangkan perekonomian daerah-daerah wisata di kawasan pesisir Samboja, yakni pantai. Berdasarkan kajian Maria dkk (2022) diketahui bahwa motif wisatawan untuk berlibur ke pesisir Samboja dipengaruhi oleh pendapatan turis, biaya perjalanan, dan waktu perjalanan. Modernisasi berpeluang menambah kunjungan turis ke daerah wisata karena pembangunan fisik yang telah dilakukan akan dapat mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan oleh masing-masing turis. Hal ini tentu saja menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat lokal pesisir Samboja.

Selain itu, IKN menjadi daya tarik bagi para pendatang dan berpeluang berkembangnya daerah industri baru di sekitarnya seperti, kawasan pesisir Samboja (Budiman, dkk, 2024). Kawasan pesisir Samboja telah diperkirakan akan menjadi zona tempat tinggal para pendatang. Kecamatan Samboja akan menjadi pintu masuk para pendatang untuk masuk dalam kawasan IKN (Nugroho, dkk, 2021). Kawasan Samboja direncanakan menjadi pusat industri berskala besar dan sumber hasil laut dan perikanan (Budiman dkk, 2024).

Pembangunan pesisir Samboja diperkirakan akan memberikan perubahan sosial. Freedman dkk (1952) dalam Friedman dan Ladinsky (2021) menjelaskan bahwa perubahan sosial dipahami sebagai "any nonrepetitive alteration in the established modes of behavior in society." Perubahan ini tidak akan berulang dalam perilaku yang ada di masyarakat. Hal ini terjadi perubahan secara umum terjadi pada nilai-nilai atau teknologi yang diikuti dengan perubahan-perubahan dalam hubungan sosial yang belum tentu terulang kembali. Selain itu, perubahan sosial akan mengubah

secara signifikan pada struktur sosial atau budaya yang telah ada dalam masyarakat (Servaes, 2011).

Perubahan sosial yang terjadi di pesisir Kecamatan Samboja dapat berisikan konten sosial-ekonomi daan berdampak positif maupun negatif. Hal ini dikarenakan adanya nilai-nilai dan teknologi-teknologi baru sebagai akibat dari pembangunan IKN hingga ke kawasan pesisir Kecamatan Samboja.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian akan membahas tentang perubahan sosial pasca penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada masyarakat pesisir Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini akan berfokus bentuk perubahan sosial yang telah dirasakan pada masyarakat pesisir Samboja pasca penetapan IKN. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi di pesisir Samboja dan menjelaskan dampak-dampak sosio-ekonomi yang telah dirasakan pasca kehadiran IKN.

## **METODE**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah dapat didefinisikan sebagai proses berulang untuk memahami suatu fenomena ilmiah dengan mendekati diri dengan fenomena yang diteliti (Aspers & Corte, 2019). Proses penelitian kualitatif dapat mengetahui objek yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini sebagai jembatan untuk mendapatkan gambaran mendetail terkait fenomena yang dikaji (Creswell, 2015). Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini secara spesifik dapat menggambarkan interpretasi tentang konteks dan situasi dari fenomena yang diteliti secara jelas. Pemilihan metode ini agar dapat menggambarkan fenomena perubahan sosial yang terjadi di kawasan pesisir Samboja dengan konteks pasca penetapan IKN.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik ini dipahami sebagai sebuah cara untuk mendapatkan sampel dengan memilih sampel di antara populasi yang dikehendaki oleh peneliti (Asrulla, 2023). Pemilihan teknik ini dikarenakan peneliti telah memahami informasi yang dibutuhkan dari diperoleh dari satu pihak yang mampu menginformasikan data-data yang memenuhi kriteria peneliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dalam kajian ini adalah wawancara dan observasi. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban dari responden dicatat atau direkam (Nurboko dan Achmadi, 2007). Wawancara yang dilakukan dalam kajian ini berhubungan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, seperti lurah, ketua Pokdakan, para pelaku usaha perikanan, dan lainnya.

Selain itu, data dalam penelitian ini juga didapatkan dengan observasi. Observasi adalah teknik yang menekankan keaktifan peneliti untuk mengamati dan mencatat berbagai perilaku, interaksi, dan konteks yang terjadi dalam situasi yang diteliti (Bogdan & Biklen, 2017). Observasi digunakan dalam kajian ini untuk memahami bentuk perubahan-perubahan yang didapatkan oleh para narasumber pasca ditetapkannya IKN di Kalimantan Timur.

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka tahapan berikutnya adalah menganalisis data. Menurut Sugiyono (2018) analisis data adalah upaya dalam menyusun berbagai data secara sistematis dengan ara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih data-data yang penting, dan membuat kesimpulan guna mudah dipahami.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sesuai dengan Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018) menjelaskan bahwa analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah pencatatan data secara rinci dengan merangkum, memfokuskan hal-hal yang penting. Hal ini dilakukan dengan pencatatan hal-hal yang berhubungan perubahan sosial di lokasi penelitian.

Selanjutnya, penyajian data berhubungan dengan pemaparan singkat dalam pemaparan bentuk uraian singkat dengan bagan dan hubungan antarkategori dan sejenisnya. Dalam kajian ini peneliti melakukan hubungan antarkategori sesuai dengan teori yang digunakan. Dalam tahapan terakhir, analisis data dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan penyajian data yang ada. Penyajian data dalam kajian ini akan dipaparkan dalam bagian kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Masyarakat Perikanan di Pesisir Samboja

Gambaran umum masyarakat perikanan di pesisir Samboja dapat dipahami dari profesinya. Sebagian besar masyarakat pesisir Samboja bekerja di sektor migas. Jika tidak diterima berkerja di perusahaan, pilihannya adalah bekerja di perikanan tangkap. Berdasarkan preferensi tersebut, presentase masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan tergolong kecil. Sebagai contoh, jumlah nelayan di Desa Amborawang Laut hanya sekitar 14 orang. Berdasarkan *fishing ground*-nya, mereka terbagi menjadi nelayan pinggir dan nelayan bagan. Nelayan pinggir adalah nelayan yang mencari ikan di pinggir pantai tanpa menggunakan perahu, sedangkan nelayan bagan adalah nelayan yang mencari ikan dengan menggunakan perahu di lokasi yang lebih jauh dibanding nelayan pinggir.

Selanjutnya, penduduk di wilayah Muara Jawa yang mayoritas bekerja di sebagai nelayan tangkap dan mencari ikan di kawasan Sungai Mahakam. Alat tangkap yang digunakan adalah setrum dan rawai. Ikan yang ditangkap yaitu udang laut, kerapu kakap, dan kakap merah dengan hasil tangkapan rata-rata mencapai 20 kg per hari. Sebagian kecil nelayan juga mencari ikan ke laut lepas. *Fishing ground* mereka terletak di Selat Makassar. Alat tangkap yang digunakan, yaitu rengge besar untuk menangkap ikan tongkol. *Fishing trip* selama 1 minggu. *Fishing ground* nelayan berkapal besar melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang merupakan lalu lintas laut internasional sehingga di tengah laut mereka sering bertemu dengan kapal-kapal besar dan kapal batubara terutama kapal yang berangkat dari Bontang menuju Sulawesi dan sebaliknya.

Selain itu, profesi masyarakat Muara Jawa juga ada yang sebagai petambak. Para petambak ikan Muara Jawa melakukan kegiatan usaha budidayanya di desa lain dan bahkan di kecamatan lain. Lokasi tambak berada di Desa Muara Kembang, Muara Ulu Besar, Muara Ulu Kecil, Sepatin, Muara Badak, dan Muara Pega. Tambak-tambak tersebut semuanya terletak di pinggir Sungai Mahakam dan sebagian besar dibuka bersamaan dengan *booming*-nya pembukaan sumur minyak pada tahun 1970-an. Pola penguasaan lahan tambak pada awalnya dilakukan sesuai dengan kemampuan petambak dalam membuka lahan di Kawasan Mangrove. Akan tetapi, sekarang cara tersebut sudah tidak dilakukan karena kawasan tersebut ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi mangrove.

### Profil Kelompok Masyarakat Perikanan di Pesisir Samboja

Berdasarkan profesinya, sebagian masyarakat perikanan di Pesisir Samboja tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar). Pembentukan kelompok-kelompok tersebut secara administrasi dibantu oleh penyuluh perikanan, RT dan kelurahan. Selain kelompok-

kelompok tersebut, sebagai daerah pengembangan pariwisata dibentuklah Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis. Pokdarwis merupakan kelompok binaan Dinas Pariwisata.

Lingkup kegiatan Pokdarwis yaitu:

1. Mengelola pantai supaya pantai bersih, aman, pengunjung mempunyai kesan pulang dari pantai;
2. Mengirimkan anggota Pokdarwis untuk mempromosikan wisata dalam kegiatan di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi; dan
3. Mempromosikan kegiatan wisata di media sosial baik melalui Facebook sama Instagram.

Bentuk pengelolaan yang dilakukan adalah mengelola tiket untuk biaya kebersihan dan keamanan di pantai yang dikelola oleh Pokdarwis dan pantai milik pribadi yang dikelola oleh investor, seperti *resort*. Perhitungan karcis dan kebersihan dilakukan dengan metode *trial and error*. Satgas Pokdarwis pernah mencoba menggaji karyawan secara harian dan bulanan. penentuan sumbangan kebersihan dan keamanan dari pemilik *resort* sudah disepakati dari awal.

Pokdarwis mempunyai kesepakatan dengan investor-investor tentang besarnya sumbangan kebersihan dan keamanan. Besarnya sumbangan ditentukan berdasarkan kemampuan Pokdarwis untuk membayar petugas kebersihan dan keamanan. Kekurangan pembayarannya akan dikenakan oleh pemilik *resort*. Komunikasi antara Pokdarwis dan pemilik *resort* diagendakan untuk dilakukan per 3 bulan sekali dan setiap bulan sekali. Tiga bulan sekali rapat besar, hari besar khusus seperti lebaran haji untuk membahas mengenai kebersihan, keamanan, jam buka dan jam tutup serta penggajian petugas.

Bentuk Kerjasama antara investor dan masyarakat dalam pengelolaan wisata:

1. Kontinasi antara masyarakat (terutama pensiunan nelayan, pengepul atau punggawa) dan pemilik *resort*. Misalnya masyarakat yang mempunyai *banana boat* bisa melintaskan *banana boat*nya di pantai milik *resort* dengan pola bagi hasil;
2. Kerja sama dengan beberapa tempat seperti apa ya apa namanya hutan pinggiran terus kita satu bekantan di Sungai Hitam berupa paket jadi itu dari penginapan dari kunjungan wisatanya apa. Penyusunan paket dilakukan oleh seluruh ketua Pokdarwis di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Kecamatan Samboja;
3. Untuk mempromosikan wisata di Pesisir Samboja, Pokdarwis menggunakan media sosial. Sebagai contoh, Pantai Ambalat mempunyai akun Instagram dan dua akun Youtube. Setiap informasi dari Pokdarwis diteruskan ke setiap grup warga di tingkat. *Follower* media sosial milik Pokdarwis terdiri dari grup anak muda dan grup seluruh RT. Kelemahan dari penggunaan media sosial sebagai media promosi dan komunikasi adalah mudahnya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang merugikan pelayanan wisata, misalnya berita bohong mengenai jadwal tutup pantai pada tahun baru balik.

### **Analisis Perubahan Sosial di Pesisir Samboja**

Analisis akan diawali dengan konsep perubahan sosial milik Freedman dkk dan Servaes. Freedman dkk menjelaskan bahwa setiap perubahan yang tidak berulang dalam perilaku yang ada di masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam pesisir Samboja tidak akan berulang kembali dengan pasca penetapan IKN. Hal ini dapat memberi peluang perubahan perilaku hidup masyarakat pesisir Samboja. Selanjutnya, Servaes (2011) menjelaskan perubahan sosial akan mengubah secara signifikan pada struktur sosial atau budaya yang telah ada dalam masyarakat. Pasca penetapan IKN, struktur sosial dan budaya masyarakat pesisir Samboja berpotensi untuk berubah.

Akan tetapi, pasca penetapan IKN, perubahan sosial belum sepenuhnya terjadi di pesisir Samboja. Belum ada perubahan dalam perilaku hidup masyarakat setelah kehadiran IKN. Struktur sosial dan budaya belum dipengaruhi oleh penetapan IKN. Berbagai perencanaan pemerintah yang pelan-pelan dilaksanakan nyatanya belum benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat sehingga perubahan sosial belum terjadi sepenuhnya.

Perubahan sosial harus memenuhi keseluruhan ciri-cirinya, antara lain (Sukanto, 2017):

1. Berbagai perubahan yang terjadi pada lembaga sosial akan diikuti dengan beragam perubahan pada lembaga sosial lainnya;
2. Masyarakat yang tidak stagnan. Perubahan masyarakat yang terjadi secara lambat dan cepat;
3. Perubahan sosial mengakibatkan terjadinya disorganisasi.
4. Berbagai perubahan yang tidak terorganisir khususnya dalam bidang spiritual atau kebendaan.

Berdasarkan ciri-ciri yang ada di atas diketahui bahwa belum adanya lembaga-lembaga sosial pasca penetapan IKN di wilayah pesisir Samboja. Selain itu, kelembagaan-kelembagaan yang ada belum terdapat perubahan pasca penetapan IKN. Hal ini menjadikan masyarakat pesisir Samboja relatif masih stagnan bila dibandingkan sebelum penetapan status IKN. Kehidupan masyarakat belum melahirkan disorganisasi, khususnya di bidang spiritual dan kebendaan.

Dalam kondisi di pesisir Samboja diketahui bahwa banyak rencana Pembangunan fisik yang akan dibangun. Aneka Pembangunan fisik ini diharapkan akan memberikan kesiapan dari perubahan sosial bagi warga Samboja, termasuk kawasan pesisir. Dalam kenyataannya semua aktivitas yang terjadi dalam masyarakat perikanan pesisir Samboja belum banyak berubah sejak ditetapkannya IKN. Aneka kelembagaan masyarakat pun belum mengalami perubahan perilaku organisasinya. Beberapa dari kelompok perikanan di pesisir Samboja memang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah, namun hal ini tidak berdampak besar dalam produksi perikanan karena sebagian kelompok hanya untuk memenuhi kebutuhan ikan di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Balikpapan.

### **Analisis Fungsional Struktural**

Selanjutnya, hasil penelitian diatas dapat dilihat dari teori fungsional-struktural milik Robert K. Merton. Teori ini menekankan ketertiban dan mengabaikan konflik dan perubahan di ruang publik. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan (Ritzer, 2010). Robert K. Merton mengajukan pula suatu konsep yang disebutnya sebagai disfungsi. Disfungsi ini merupakan salah satu cara untuk memperbaiki dan menutupi kelemahan dalam teori fungsionalisme struktural. Merton mengungkapkan gagasannya tentang disfungsi, yang didefinisikan sebagai sebab negatif yang muncul dalam penyesuaian sebuah sistem.

Merton juga memperkenalkan fungsi manifes dan fungsi laten. Kedua istilah ini menjadi bagian penting dalam analisis fungsional. Secara sederhana, fungsi manifes dipahami sebagai fungsi yang diharapkan (intended), sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak diharapkan (non intended).

Konsep fungsi dan disfungsi juga sangat berkaitan dengan kasualitas dari konsekuensi suatu sistem. Konsekuensi dapat diantisipasi berupa sesuatu yang positif dengan sadar pada sistem (fungsi manifes) dapat juga berupa menghasilkan hal yang negatif (disfungsi manifes). Selain itu, dalam disfungsi sistem terdapat konsekuensi yang tidak dapat bisa diantisipasi yang berakibat positif tidak dengan sadar (fungsi laten) maupun negatif (disfungsi laten). Akibat fungsi pun bisa tidak relevan (Non fungsi) (Ritzer, 2010).

Pasca keberadaan IKN, banyak kelompok perikanan menerima bantuan di pesisir Samboja. Sebagai contoh: 1) KUB menerima bantuan alat tangkap, mesin dompeng, mesin ketinting, perahu ketinting dan perahu lempeng; 2) Bantuan untuk Pokdakan berupa benih untuk budidaya tambak. 3) Poklhasar masih minim karena hasil tangkapan ikan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan segar masyarakat sekitar.

Aneka bantuan yang diterima oleh kelompok perikanan adalah wujud fungsi laten yang bermanfaat. Hal yang dikarenakan bantuan-bantuan tersebut menjadi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan produksi dari masing-masing kelompok perikanan. Tetapi, kenyataannya hasil tangkapan ikan juga tidak ada perubahan, jumlah perizinan industri juga belum ada perubahan. Tidak ada peranan dari pihak-pihak terkait dalam proses ini, seperti sosialisasi IKN dan dampaknya bagi pesisir Samboja. Kondisi ini adalah suatu disfungsi laten karena harapan dari pemberian bantuan tersebut belum terwujud. Hal ini dikarenakan minimnya tindak lanjut dari pihak-pihak terkait agar para kelompok nelayan tersebut meningkat produktivitasnya.

Di sisi lain, dampak yang saat ini dirasakan di kawasan pesisir Samboja meningkatnya penjualan tanah kepada pendatang terutama investor untuk pembangunan wisata. Pembangunan wisata dilakukan melalui komodifikasi dan privatisasi pantai. Akibatnya, masyarakat mengalami syok atas terjadinya perubahan tersebut karena sebelumnya pantai bersifat *open access*. Proses ini termasuk dalam klasifikasi non-fungsi di mana konsekuensi peningkatan penjualan tanah kepada para pendatang kurang relevan bagi bidang produksi perikanan sebagai sistem di mana kelompok-kelompok perikanan sebagai aktor.

Perubahan produksi perikanan tidak akan terlihat langsung apabila hanya sekedar pemberian bantuan tanpa tindak lanjut. Merton (dalam Humaedi, 2013) menjelaskan struktur sosial sebagai serangkaian hubungan sosial teratur yang mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu dengan satu atau lain cara. Dalam konteks ini fenomena kelompok perikanan membutuhkan serangkaian hubungan sosial secara teratur yang mempengaruhi setiap kelompok perikanan. Struktur-struktur sosial yang lain, yakni pihak-pihak terkait yang memiliki andil dalam pengembangan masyarakat perikanan di Pesisir Samboja.

Kondisi disfungsi laten yang terjadi di mana belum dirasakannya perubahan sosial bagi para kelompok perikanan di pesisir Samboja merupakan ketidakmampuan individu-individu untuk bertindak sesuai nilai-nilai normatif dari pemerintah terkait penetapan IKN. Kawasan pesisir Samboja yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan menjadi kawasan industri yang mendukung pengembangan IKN (Pratama, dkk, 2024). Tetapi, yang terjadi adalah kesulitan masyarakat pesisir untuk dapat beradaptasi untuk memenuhi kesiapan dampak IKN (Paramananda & Iskandar, 2023). Proses kesiapan ini dipahami sebagai bentuk nilai-nilai normatif dari penetapan IKN. Apabila disfungsi ini dapat dianggap sebagai gejala penyimpangan dalam masyarakat di mana mereka tidak peduli atau pun cenderung negatif terhadap keberadaan IKN.

Disfungsi laten yang terjadi ini pun dapat dipahami sebagai gejala anomie masyarakat perikanan di Pesisir Samboja terhadap penetapan IKN. Merton (1968) menjelaskan anomie sebagai perbedaan yang muncul ketika sasaran dan secara sosial melalui metode yang dianggap dan tersedia guna mencapainya.

Gejala Anomie yang hadir dalam masyarakat pesisir Samboja menghadirkan salah satu dari lima bentuk respon yang ada (Ninieck, 2007):

1. Adaptasi konformitas (conformity)



Pada cara adaptasi ini, perilaku seseorang mengikuti cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat.

2. Adaptasi inovasi (innovation)

Pada cara adaptasi ini, perilaku seseorang mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat. Akan tetapi ia memakai cara yang dilarang oleh masyarakat.

3. Adaptasi ritualisme (ritualism)

Pada cara adaptasi ini, perilaku seseorang telah meninggalkan tujuan budaya, tetapi tetap berpegang pada cara yang telah ditetapkan oleh masyarakat.

4. Adaptasi retreatisme (retreatism)

Bentuk adaptasi ini, perilaku seseorang tidak mengikuti tujuan dan cara yang dikehendaki.

5. Adaptasi pemberontakan (rebellion)

Pada bentuk adaptasi terakhir ini orang tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan struktur sosial yang baru. Tujuan budaya yang ada dianggap sebagai penghalang bagi tujuan yang didambakan.

Dalam konteks gejala anomie bidang perikanan di pesisir Samboja, kecenderungan masyarakat akan mengambil pilihan respon ritualisme. Artinya, masyarakat perikanan hanya mengikuti norma-norma tanpa fokus pada pencapaian tujuan sosial, yakni perubahan sosial sebagai pendukung mitra IKN. Mereka hanya fokus pada kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Jenis adaptasi ini akan melahirkan rutinitas, ketegangan, dan potensi untuk mengurangi orientasi tujuan sosial tersebut. Potensi ketegangan terjadi karena adanya anggapan masyarakat menganggap kehadiran IKN hanya akan mendatangkan urbanisasi dari luar Kalimantan Timur, semakin meningkatnya disposisi lahan karena penjualan tanah kepada pendatang, meningkatnya kriminalitas dan perilaku asusila, dan meningkatnya kesenjangan perekonomian pendatang dan penduduk asli.

Selain itu, pilihan ritualisme juga diambil karena kehadiran IKN belum memberikan dampak yang benar-benar nyata sehingga masyarakat masih melakukan rutinitas sehari-hari. Mereka menganggap secara internal masyarakat telah mempunyai kelembagaan yang cukup kuat untuk menangkal ancaman yang berasal dari luar. Masyarakat perikanan yang berprofesi sebagai nelayan tangkap tidak takut dengan perkiraan bahwa meningkatnya aktivitas atau lalu lintas di laut akan menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan atau pembatasan wilayah tangkap karena sudah ada jalurnya masing-masing dan nelayan sudah terbiasa dengan kondisi tersebut. Jalur-jalur lalu lintas dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas laut, mercusuar dan lampu navigasi. Nelayan dan perusahaan saling menghormati dan menghargai, misalnya ketika kapal besar melintasi kapal kecil, kapal kecil menyingkir terlebih dulu agar perahunya tidak terbalik akibat hantaman ombak.

## **KESIMPULAN**

Pasca penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada masyarakat pesisir Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur disimpulkan bahwa perubahan sosial yang terjadi belum sepenuhnya dirasakan pada struktur sosial dan budaya masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari tidak terpenuhinya ciri-ciri perubahan sosial di pesisir Samboja, meliputi: belum adanya kelembagaan baru pasca penetapan IKN maupun perubahan dari kelembagaan yang sudah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir sebagai mitra IKN; masyarakat yang cenderung masih stagnan pasca penetapan status IKN dan perubahan datang lebih lambat dari yang direncanakan; dan masyarakat relatif masih hidup dengan ketiadaan disorganisasi karena perubahan sangat

lambat. Berdasarkan analisis fungsional struktural, diketahui perubahan sosial yang terjadi di pesisir Samboja mewujudkan kondisi disfungsi laten karena banyak harapan yang belum terwujud, seperti yang direncanakan. Banyak pihak yang keterlibatannya dianggap masih kurang dalam upaya peningkatan produksi ikan di beberapa kelompok nelayan. Selain itu, perubahan sosial yang hadir dalam kawasan pesisir Samboja diketahui mewujudkan kondisi non-fungsi atas banyaknya pembangunan daerah wisata melalui privatisasi pantai yang sebelumnya bersifat *open access*. Hal ini menimbulkan dampak penjualan tanah kepada para pendatang yang kurang relevan dengan bidang perikanan.

Secara fungsional struktural, kondisi masyarakat pesisir Samboja melahirkan suatu gejala anomie dengan kecenderungan respon ritualisme. Masyarakat pesisir Samboja hanya mengikuti norma-norma dan kurang fokus pada pencapaian tujuan sosial, yakni menjadi mitra pendukung mitra IKN. Jenis adaptasi ini dipilih karena fokus rutinitas, ketegangan, dan potensi mengurangi capaian tujuan dari perubahan sosial. Dalam konteks gejala anomie bidang perikanan di pesisir Samboja, kecenderungan masyarakat akan mengambil pilihan respon ritualisme. Artinya, masyarakat perikanan hanya mengikuti norma-norma tanpa fokus pada pencapaian tujuan sosial, yakni perubahan sosial sebagai pendukung mitra IKN. Mereka hanya fokus pada kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Jenis adaptasi ini akan melahirkan rutinitas, ketegangan, dan potensi untuk mengurangi orientasi tujuan sosial tersebut. Potensi ketegangan terjadi karena adanya anggapan masyarakat menganggap kehadiran IKN hanya akan mendatangkan urbanisasi dari luar Kalimantan Timur, semakin meningkatnya disposisi lahan karena penjualan tanah kepada pendatang, meningkatnya kriminalitas dan perilaku asusila, dan meningkatnya kesenjangan perekonomian pendatang dan penduduk asli. Selain itu, pilihan ritualisme juga diambil karena kehadiran IKN belum memberikan dampak yang benar-benar nyata sehingga masyarakat masih melakukan rutinitas sehari-hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aspers, Patrik, and Ugo Corte. (2019). What is qualitative in qualitative research. *Qualitative Sociology*, 42, 139-160.
- Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (kuantitatif), serta Pemilihan Informan Kunci (kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320-26332.
- Berawi, M. A. (2022). City of tomorrow: The New Capital City of Indonesia. *International Journal of Technology*, 13(4).
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2017). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods* (6th ed.). Pearson
- Budiman, P. W., Musthofa, A., & Reinhart, H. (2024). Prospective Pte[ri-Urban Areas Around the New Capital City of Nusantara, Indonesia: Sustainable Development and New Urban Agenda Perspectives. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1313, No. 1, p. 012020). IOP Publishing.
- Friedman, L. M., & Ladinsky, J. (2021). *Social Change And The Law of Industrial Accidents. Governing Risks* (pp. 127-159). Routledge.
- Herdiawanto, H. (2023). The Position of The Nusantara Capital City From A National Security Perspective. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan & Politik*, 36(4).

- Humaedi, M. A. (2013). Dilema Peran Kelompok Haji dalam Penguatan Tradisi Budaya dan Sosial Keagamaan: Studi Kasus Masyarakat Sungai Nyamuk Sebatik. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 15(1), 131-156.
- Jauchar, B., Budiman, B., Idris, A., Nasir, B., & Khaerunnisa, A. (2022). The Impact of IKN on Socio-Economic Development in Penajem Paser Utara (PPU) and Kutai Kartanegara. *Journal of Governance and Public Policy*, 9(2), 161-170. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v9i2.14083>
- Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara
- Maria, S., Lestari, D., & Darma, D. C. (2022). The existence of tourist visits in Samboja, Indonesia: A Prediction. *Journal of Business on Hospitality and Tourism*, 8(1), 98-113.
- Niko, N. (2024). The IKN Project Invades Living Spaces: Evictions and Changes in the Livelihood System of Indigenous Communities. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(2), 171-175.
- Nurboko, C., dan A. Achmadi. 2007. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara: Jakarta
- Nugroho, D., Kahar, A., & Sulistioadi, Y. B. (2021). Analysis of Housing Land Carrying Capacity in the District Palaran, Samarinda City, East Kalimantan. *Jurnal Infrastruktur*, 7(2), 111-119.
- Paramananda, D., & Iskandar, D. A. (2024). Tingkat Kesiapan Masyarakat Balikpapan Dalam Pembangunan IKN. *Jurnal Riset Pembangunan*, 7(1), 50-65.
- Pratama, P. P., Buchori, L., & Purbasari, A. (2024). Peta Jalan (Roadmap) Hilirisasi Industri Manufaktur Berbasis Logam untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. *Jurnal Profesi Insinyur Indonesia*, 2(1), 1-8.
- Praditya, E., Suprpto, F. A., Ali, Y., Surjaatmadja, S., & Duarte, R. (2023). Nusantara Capital City (IKN): Threats and Defense Strategies for Indonesia's New Capital. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 4(1), 21-34.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. (2010). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Saputra, Hanafi, Hidayah, Hidayah, A. & Rani Kartika, R. (2024). Development of Ibu Kota Nusantara: The Threat of Mechanical Solidarity to Indigenous Communities. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(12).
- Servaes, J. (2011). Social Change. Oxford Bibliographies Online (OBO), Oxford University Press. [www.oxfordbibliographiesonline.com/display/id/obo-9780199756841-0063](http://www.oxfordbibliographiesonline.com/display/id/obo-9780199756841-0063)
- Simarmata, H. A., Rafliana, I., Herbeck, J., & Siriwardane-de Zoysa, R. (2023). Futuring 'Nusantara': Detangling Indonesia's Modernist Archipelagic Imaginaries. *Ocean Governance: Knowledge Systems, Policy Foundations and Thematic Analyses* (pp. 337-363). Cham: Springer International Publishing.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Ulimaz, M., Harfadli, M. M. A., & Syafitri, E. D. (2024). The Existence of City Branding Entrenched Object Density Patterns and City Branding Experience Impressions Case Study in 4 (four) Supporting Urban Areas of Nusantara New Capital City (IKN Nusantara), Indonesia. *International Review for Spatial Planning and Sustainable Development*, 12(3), 118-138.
- Wahyuni, Niniek. (2007). *Manusia dan Masyarakat*. Jakarta: Ganeca Exact.